

TESIS
TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN

Untuk memenuhi persyaratan
Guna memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum
Program studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma



OLEH:

SAMSUL ARIFIN

NIM : 23310028

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

2024

**TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**

TESIS

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum
Program Studi Hukum Program Magister**

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



OLEH :

SAMSUL ARIFIN

NIM : 23310028

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA**

2024

TESIS

**TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**

**Diajukan Oleh :
SAMSUL ARIFIN
NPM: 23310028**

Tesis ini telah disetujui untuk di uji
Pada 25 JULI 2024

Pembimbing I

Dr.Umi Anggarsasi,S.H.,M.Hum

Pembimbing II

Dr.Cita Yustisia Serfiyani,S.H.,M.H

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya


Dr.Joko Nur Sariono,S.H.,M.H

TESIS

**TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**

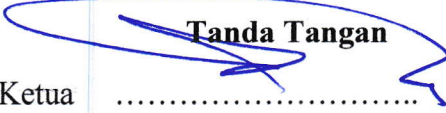



Dipersiapkan Oleh :

SAMSUL ARIFIN

NPM: 23310028

Telah dipertahankan di depan Dewan penguji dan telah direvisi sebagaimana

Disarankan oleh tim penguji pada tanggal 25 Juli 2024

Nama Penguji		Tanda Tangan
1. Prof.Dr. Ari Purwadi,S.H.,M.Hum	Ketua 
2. Dr.Umi Anggarsasi,S.H.,M.Hum	Anggota
3. Dr.Cita Yustisia Serfiyani,S.H.,M.H	Anggota 
4. Dr.Edi Krisharyanto,S.H.,M.H	Anggota 
5. Dr. Peni Jati Setyowati,S.H.,M.H	Anggota 

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan

Untuk memperoleh gelar magister

Tanggal 25 Juli 2024

Ketua Program Studi

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya


Dr.Joko Nur Sariono,S.H.,M.H

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan Karunia-nya sehingga saya bisa menyelesaikan TESIS ini dengan baik yang berjudul “ **TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**”

Penulisan tesis ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Hukum di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Dalam penyelesaian tesis ini, saya mendapat banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini, ucapan terima kasih yang sebesar- besarnya penulis sampaikan kepada :

1. Prof. Sri Harmadji, dr. Sp. THT-KL(K) selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
3. Dr. Joko Nur Sariono, SH.,M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
4. Dr. Umi Anggarsasi, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama (I) yang telah memberikan semangat, membimbing dan mengarahkan penyusunan Tesis ini.
5. Dr. Cita Yustisia Serfiyani, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Pendamping (II) yang dengan tulus selalu memberikan arahan serta bimbingan selama penulisan Tesis ini.
6. Prof. Dr. Ari Purwadi, SH.,MHum., selaku Ketua Penguji yang telah

banyak memberikan inspirasi, bimbingan dan masukan dalam penulisan Tesis ini.

7. Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H., selaku Para Penguji juga dengan sabar dan cekatan dalam memberikan bimbingan serta masukan dalam penulisan Tesis ini.
8. Dr. Peni Jati Setyowati, S.H., M.H., selaku Para Penguji juga berperan aktif dalam memberikan masukan dan arahan sehingga dapat tercapainya penulisan Tesis ini.
9. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala kasih dan perhatian mendidik peneliti selama menjadi mahasiswa di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
10. Para staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma, terimakasih atas bantuan yang diberikan kepada peneliti selama ini
11. Teman-teman seangkatan tahun 2023, yang memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan Tesis ini.

Saya berharap semoga Allah SWT memberi balasan atas segala kebaikan yang telah diberikan dan silaturahmi bisa tetap terjalin selamanya. Mohon maaf atas segala kekurangan yang mungkin terdapat dalam Tesis ini. Hal tersebut disebabkan karena keterbatasan dalam akses, pengalaman, pengetahuan, dan referensi. Akhir kata, saya berharap Tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Surabaya, 03 Agustus 2024

Penulis

SAMSUL ARIFIN

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama: : SAMSUL ARIFIN

NIM : 23310028

Alamat : Raden Wijaya 90, RT.003, RW.005, Desa Sawotratap, Kecamatan
Gedangan Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa timur

No.Telpon : 081333387174

Menyatakan bahwa Tesis yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN”** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain

Apabila ternyata nantinya Tesis tersebut ditemukan adanya unsur *plagiarisme* maupun *autoplaiarisme*, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 03 Agustus 2024



Yang menyatakan

SAMSUL ARIFIN

NIM : 23310028

ABSTRACT

In the expansion of its objectives a convicted must also pay attention to justice for victims. The principle of equality before the law should be applied as equal justice for the perpetrators and for the victims. If the state takes over the enforcement of the criminal law because the mandate of the victim as a citizen of the state, the state shall be liable to the victim. This paper will discuss, the philosophical foundations of the State's responsibility to victims of crime, the principle of justice in the form of state responsibility to the victim as a result of failure of the responsibility of the offender conducting the sentence. Due to legal science has characteristics that are perceptive so this study, using normative legal research (doctrinal) is the research to produce arguments, theories or new concepts as prescriptions in solving the problems faced.

Keywords: The principle of Justice; The Responsibility of The State; The Victim; Punishment.

ABSTRAK

Dalam perluasan tujuannya seorang terpidana juga harus memperhatikan keadilan bagi korban. Asas persamaan di muka hukum harus diterapkan sebagai keadilan yang sama bagi pelaku dan bagi korban. Apabila negara mengambil alih penegakan hukum pidana karena amanat korban sebagai warga negara, maka negara bertanggung jawab kepada korban. Tulisan ini akan membahas, landasan filosofis tanggung jawab negara terhadap korban tindak pidana, asas keadilan berupa tanggung jawab negara terhadap korban sebagai akibat dari kegagalan tanggung jawab pelaku tindak pidana dalam menjalankan hukumannya. Dikarenakan ilmu hukum memiliki karakteristik yang bersifat perkriptif maka penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (doktrinal) yaitu penelitian untuk menghasilkan argumen, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Kata Kunci: Asas Keadilan; Tanggung Jawab Negara; Korban; Pidana.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
HALAMAN PERSETUJUAN.....	II
HALAMAN PENGESAHAN.....	III
KATA PENGANTAR.....	IV
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	VI
ABSTARCT.....	VII
ABSTRAK.....	VIII
DAFTAR ISI.....	IX
DAFTAR SINGKATAN.....	
BAB I PENDAHULUAN.....	I
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Penelitian.....	13
1.5 Kerangka Teoritis.....	13
1. Teori Perlindungan Hukum.....	14
2. Teori Tanggungjawab Negara.....	16
3. Teori Tindak Pidana Perampasan Dengan Kekerasan (strafbaarfeit)...	17
1.6 Metode Penelitian	28
1.6.1 Jenis Penelitian.....	28
1.6.2 Pendekatan Masalah.....	28
1.6.3 Sumber Bahan Hukum.....	29
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Dan Pengolahan Bahan Hukum.....	30
1.6.4.1 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	30
1.6.4.2 Teknik Pengolahan Bahan Hukum.....	31
1.6.4.3 Teknik Analisa Bahan Hukum.....	31
1.7 Sistematika Penulisan	32

BAB II

PERLINDUNGAN HUKUM DAN DAMPAK TERHADAP KORBAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN

- 2.1. Perlindungan Hukum Korban Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.....34
 - 2.1.1 Bentuk Suatu Hak dan Pelayanan Dalam Perlindungan Hukum Korban.....35
- 2.2. Sistem Peradilan Pidana Yang Berpegang Pada Keputusan Hakim Dalam Penegakan Hukumnya.....36
 - 2.2.1. Analisa Putusan Nomor 1839/Pid.B/2023/PN.Sby Dalam Menuntut Ganti Kerugian Materil dan Imateriil.....37
 - 2.2.2. Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 1839/Pid.B/2023/PN.Sby...42
 - 2.2.3. Tujuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban agar terakomodasinya hak korban serta saksi dalam proses peradilan.....47
 - 2.2.4. Perlindungan Hukum Korban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dan Pemberatan Menurut KUHP.....48
 - 2.2.5. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Berfungsi Sebagai Dasar Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.....49

BAB III

BENTUK TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN

- 3.1. Tinjauan Bentuk Tanggungjawab Negara Bagi Korban Tindak Pidana Pencurian dan Pemberatan Melalui Ganti Kerugian.....51
 - 3.1.1. Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan menurut Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.....54
 - 3.1.2. Perlindungan Terhadap Korban Menurut Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1839/Pid.B/2023/Pn.Sby.....57
- 3.2. Landasan Filosofis Tanggung Jawab Negara terhadap Korban Tindak Pidana.....61
 - 3.2.1. Penerapan Hukum Teori Kedaulatan Negara Yang Memerlukan Suatu Kekuasaan Untuk Mendukungnya.....63

3.2.2. Perumusan Teori Kedaulatan Hukum Yang Mengikat sebagai Kesadaran Masyarakat.....	65
3.2.3. Penjatuhan Pidana Untuk Menjamin Kelangsungan Hidup Masyarakat Dalam Mencegah Kejahatan.....	67
3.2.4. Prinsip Keadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana.....	68
3.3. Prinsip Keadilan dalam Bentuk Tanggung Jawab Negara Kepada Korban...	70

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan	78
4.2. Saran	79

DAFTAR BACAAN

DAFTAR LAMPIRAN I

DAFTAR SINGKATAN

1. UUD RI 1945 : Undang-undang dasar republik indonesia tahun 1945
2. KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. KUH.PER : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
4. HAN : Hukum Administrasi Negara
5. LPSK : Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban
6. TIPIDUM : Tindak Pidana Umum
7. CURAT : Pencurian Dengan Pemberatan